

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGGERUKAN TANAH ILEGAL  
(Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way  
Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ARI PURNAMA**

**NPM: 1621020173**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2021**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGGERUKAN TANAH ILEGAL  
(Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way  
Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ARI PURNAMA**

**NPM: 1621020173**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

**Pembimbing I**

**Dr. Susiadi AS.,M.Sos.I**

**Pembimbing II**

**Sucipto. S.Ag.,M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2021**

## ABSTRAK

Kegiatan penggalian sumber daya alam atau bahan galian seperti tanah merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan baik secara fisik, maupun sosial. Kebutuhan akan bahan galian seperti tanah tampak semakin meningkatnya seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana prasarana di berbagai daerah Indonesia. Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi sumber daya alam berupa sungai yang terkandung material tanah pasir yang melimpah. Keberadaan sungai memberi peluang pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kontroversi dan tidak ada surat izin baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pemerintahan yang berwenang. pengerukan sungai Way Pedada tersebut sudah lama beroperasi sebelum adanya Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Sehingga hal ini menarik penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai permasalahan tersebut. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum positif tentang pengerukan tanah ilegal di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Tentang pengerukan tanah Ilegal di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 pada pengerukan tanah Sungai Way Pedada, dan menganalisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Metode penelitian yaitu lapangan (*field research*), sifat penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan metode interview, dan observasi sebagai metode pokok, serta dokumentasi sebagai metode pendukung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan fakta lapangan bahwa Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat belum terlaksana secara optimal, karena masyarakat Pekon Penggawa V Ilir ekonominya sangat lemah sehingga mau tidak mau melakukan kegiatan pengerukan tanah di sungai way pedada. Tinjauan fiqh siyasah dan hukum positif tentang pengerukan tanah ilegal di Sungai Way Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yaitu prinsip kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip kepatuhan kepada pemimpin. Susunggunya pemerintah pesisir barat menyingkinkan kesejahteraan terhadap masyarakatnya dan ingin menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, aman, taqwa dan andalan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari purnama  
NPM : 1621020173  
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENERUKAN TANAH ILEGAL (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2020

Penulis

ARI PURNAMA  
NPM. 1621020173

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari purnama  
NPM : 1621020173  
Jurusan/prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG Pengerukan Tanah ILEGAL** (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2020

Penulis



ARI PURNAMA  
NPM. 1621020173





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat:** Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Nama : ARI PURNAMA**  
**NPM : 1621020173**  
**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**  
**Fakultas : Syari'ah dan Hukum**  
**Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG Pengerukan Tanah Ilegal (Studi di  
Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan  
Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I,**

**Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**

**Pembimbing II,**

**Sucipto, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197611042005011004**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat:** Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260


**PENGESAHAN**

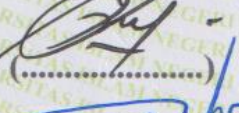
Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM  
POSITIF TENTANG Pengerukan Tanah Ilegal (Studi di Sungai  
Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten  
Pesisir Barat.”** disusun oleh: Ari Purnama, NPM: 1621020173, Program Studi  
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Telah di Ujikan dalam sidang  
Munaqasyah, Fakultas Syari’ah pada Hari/Tanggal: Selasa 22 Desember 2020

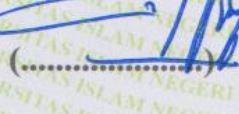
**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra. S.Ag., M.Ag** 

**Sekretaris : Anis Sofiana. M.Si** 

**Penguji I : Drs. Hendry Iwansyah. MA** 

**Penguji II : Dr. Susiadi AS. M.Sos.I** 

**Penguji III : Sucipto. S.Ag., M.Ag** 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al-A’raf:56).





## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh cinta kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta untuk Ayahku Lukman Hakim dan Ibuku Kumala Dewi, atas ketulusan mereka membesarkanku, dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Berkat doa restu keduanyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah ini.
2. Kakak-kakakku, Rika Fitria, Elsa Mutia, dan Refa Gustina yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Keponakanku tercinta, Ahmad Fikri, Sabrina, dan Hafid Robani yang telah memberikan semangat kepadaku..
4. Teman-temanku Ardi, Tessi, dan Ronal terimakasih telah memberikanku motivasi dan membantuku dalam setiap keadaan.
5. Teman-teman KKN kelompok 41 terimakasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan padaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman satu angkatan 2016 khususnya Siyasah B terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam mencapai keberhasilanku.
7. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis Ari Purnama dilahirkan di Krui, Pesisir Barat pada tanggal 13 Februari 1998, merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Lukman Hakim dan Ibu Kumala Dewi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Sekolah Dasar Negeri 03 Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat lulus tahun 2010
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat lulus tahun 2013
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENERUKAN TANAH ILEGAL (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Panggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang Insyaallah akan mendapat syafaat di akhir kelak.

Skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

5. Bapak selaku Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. Pembimbing I, dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II, dengan penuh kesabaran membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung telah memperkenankan penulis untuk meminjam literatur yang dibutuhkan.
10. Ayahku Lukman Hakim dan Ibuku Kumala Dewi yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
12. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta waktu yang dimiliki penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca atau peneliti berikutnya untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Syiasah Syar'iiyah.



Bandar Lampung

2020

Penulis

Ari Purnama

1621020173



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Masalah.....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Landasan Teori.....	9
I. Metode penelitian.....	10

## BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	18
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	20
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.....	26
4. Fiqh Siyasah Dusturiyyah .....	30
B. Tanah	
1. Pengertian Tanah.....	33
2. Hak-hak atas tanah.....	35
3. Pengerukan .....	39
4. Kerusakan lingkungan .....	41
C. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	46
D. Tinjauan Pustaka.....	50



### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat .....	53
2. Letak Geografis Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat .....	55
B. Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Pada Pengerukan Tanah di Sungai Way Pedada di Desa Way Pedada Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat .....	60
1. Dampak terhadap lingkungan di Pekon Penggawa V Ilir .....	66
2. Dampak terhadap masyarakat Di Pekon Penggawa V Ilir .....	67

### **Bab IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 pada pengerukan tanah di sungai Way Pedada di Desa Way Pedada Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat .....	69
B. Pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 pada pengerukan tanah di sungai Way Pedada di Desa Way Pedada Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat .....	71

### **Bab V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Rekomendasi .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendidikan Penduduk Pekon Penggawa V Ilir .....	56
Tabel 2. PekerjaanPenduduk Pekon Penggawa V Ilir.....	57
Tabel 3. Jumlah Penduduk Yang Melakukan Pengerukan.....	57
Tabel 4. PenggunaanLahanPekonPenggawa V Ilir .....	58
Tabel 5. Kepemilikan Hewan Ternak Pekon Penggawa V Ilir .....	58
Tabel 6. Etnis Penduduk Pekon Penggawa V Ilir .....	59
Tabel 7. Jumlah Sarana dan Prasarana PekonPenggawa V Ilir.....	60



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian di Daerah Provinsi Lampung

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4. Struktur Pekon Penggawa V Ilir

Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 6. Surat keterangan wawancara

Lampiran 7. Foto-Foto Wawancara

Lampiran 8. Blangko Konsultasi

Lampiran 9. Surat Bebas Turnitin







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG Pengerukan Tanah Ilegal (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
2. Fiqh Siyasah adalah ilmu Mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, sejarahnya perkembangannya, organisasi dan fungsi serta perannya dalam kehidupan umat, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh penguasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002), h. 43.

<sup>2</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke3, 1997), h.26

3. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>3</sup> Sedangkan hukum positif menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>4</sup>
4. Pengerukan Tanah adalah Mengambil tanah atau materi dari lokasi di dasar air, biasanya perairan dangkal seperti danau, sungai, muara ataupun laut dangkal dan memindahkan atau membuangnya ke lokasi lain.<sup>5</sup>
5. Ilegal adalah Tidak sah menurut hukum.<sup>6</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara tajam dan kritis mengenai **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG Pengerukan Tanah ILEGAL (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**.

---

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramitha, 2002), h. 58.

<sup>4</sup> C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 73.

<sup>5</sup> “Pengerukan” (On-line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengerukan>, (25 Desember 2020).

<sup>6</sup> “Ilegal” (On-line), tersedia di: <https://Kbbi.kemdikbud.go.id/enti/Ilegal>, (27 Desember 2020).



## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa kegiatan pengerukan di sungai Way Pedada tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian/pengerukan tanah yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah fakta di lapangan pengerukan sungai Way Pedada sudah sesuai izin dengan rekomendasi pemerintah setempat atau tidak. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupateen Pesisir Barat.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Tersedianya literatur yang menunjang penulis dalam usaha menyelesaikan skripsi ini guna mendapatkan gelar S.H.
- b. Daerah penelitian sangat mudah di jangkau, Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia selalu berhubungan dengan tanah bahkan di setiap aktivitasnya, selain itu tanah juga memiliki peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunan di suatu negara dikarenakan tanah

sangat dibutuhkan setiap anggota masyarakat.<sup>7</sup> Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan alam memiliki hubungan erat sekali dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berhubungan dengan tanah. Antara manusia dengan tanah merupakan suatu hal tidak dapat dipisahkan.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengerukan tanah tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar lokasi penggalian dan/atau pengerukan. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).<sup>8</sup> Tetapi jika dilihat di dalam fakta di lapangan pengerukan tanah masih terus dilakukan secara terus menerus. Masyarakat di Pekon Penggawa V Ilir mengambil tanah tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pengerukan tanah tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat atau ilegal dan jelas bertentangan dengan pasal yang sudah ada. Dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 diungkapkan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengerukan tanah tidak sesuai

---

<sup>7</sup>Theo Huijbes, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 167.

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 15

dengan izin/rekomendasi yang di berikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan lokasi penggalian/pengerukan. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Daerah inidiancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Salah satu tujuan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan serta memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Penegakan peraturan tersebut merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaanya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Bahkan juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Makna dari ayat di atas disebutkan bahwa taat kepada seorang pemimpin adalah wajib. Seorang pemimpin dalam membuat suatu peraturan

pastilah dilandaskan untuk kemaslahatan bersama, apabila dikaitkan dengan pengerukan tanah yang terjadi di sungai Way Pedada justru mereka para pengeruk sungai tidak menaati pemimpin yang sudah membuat aturan.

Penelitian ini termasuk dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyyah* yang membahas perundang-undangan negara. Dalam bagian ini juga membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang asar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>9</sup>

Peraturan Daerah yang dibuat memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal melalui peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban, kebersihan dan keindahan dan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram. Salah satu yang menjadi latar belakang permasalahan terkait kasus di atas dikarenakan tidak adanya izin, merusak lingkungan sekitar sungai dan jika pengerukan tanah dilakukan secara terus menerus maka akan menimbulkan pengikisan tanah atau erosi.

---

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 177.



Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG Pengerukan Tanah ILEGAL (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring informasi.<sup>10</sup> Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Ilegal (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Sungai Ilegal. Maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Ilegal

---

<sup>10</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44.

di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengerukan Tanah Ilegal di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan. Begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pengerukan Tanah *Ilegal* di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat?
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah Tentang Pengerukan Tanah Ilegal di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat?

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap

hidup dan berkembang khususnya Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Sungai Ilegal.

- b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Sungai Ilegal.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.
- b. Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memberikan hasil yang baik.

## H. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori yang berasal dari studi perpustakaan yang berpungsi sebagai teori atau tinjauan pustaka. Agar landasan teori sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai berikut:

- a. Landasan teori hendaknya lengkap, meliputi konsep-konsep variabel pokok yang ada dalam permasalahan.
- b. Landasan teori adalah merupakan teori-teori yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian

- c. Landasan teori dapat berupa pengertian, dasar, dalil, pendapat ahli, hasil temuan peneliti.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini teori yang dipakai yaitu teori dikarenakan permasalahan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>12</sup>

## I. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode agar penelitian sesuai dengan karya ilmiah. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang

---

<sup>11</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*(Bandar lampung:Pusat Penelitian dan penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014),h. 100

<sup>12</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2003), h. 47

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2.



dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di pengerukan tanah di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>14</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang di dapat dari orang yang dijadikan sebagai nara sumber atau informan.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka cipta, Cetakan kedua, 1993), h.309.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), h. 105

<sup>16</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

#### b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>17</sup> Data Sekunder mendukung data Primer yang bersumber dari buku-buku teori fiqh siyasah, tafsir hadist, dan buku hasil penelitian yang diperoleh peneliti yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.<sup>18</sup> Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>19</sup> Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap pengerukan tanah di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Metode Wawancara (Interview)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 40

<sup>18</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015), h. 105

<sup>19</sup> Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011), h. 118

responden.<sup>20</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditunjukkan kepada orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

#### 4. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>22</sup> Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995), h. 192

<sup>21</sup> Suharsimi arikunto, *Manajemen Penelitian*.....,h. 274.

<sup>22</sup> Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif*.....,h. 125.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>23</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Pekon Penggawa V Ilir terdiri dari: peratin, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang ada di Pekon Penggawa V Ilir.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>24</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Teknik sampling (pengambilan sampel) yang dipakai adalah *proposive sampling*. Yakni pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi, ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*.....,h. 120.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010), h. 116.

<sup>25</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*.....,h. 130.

Populasi penelitian ini mencakup masyarakat di Pekon Penggawa V Ilir yang terdiri dari 3 Dusun sehingga tidak memungkinkan jika akan diteliti secara keseluruhan, karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. misalnya waktu, dana, dan tenaga. Maka untuk melakukan generalisasi di butuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>26</sup> Maka penulis akan mengambil 15 sampel masyarakat dari 3 dusun dan 1 orang Peratin di Pekon Penggawa V Ilir dengan rincian sebagai berikut.

I. Peratin Pekon Penggawa V Ilir : 1 orang

II. Dusun Sukabumi

1. Tokoh Masyarakat : 1 orang
2. Pelaku Pengerukan : 2 Orang
3. Warga Masyarakat : 2 Orang

III. Dusun Pedada

1. Tokoh Masyarakat : 1 Orang
2. Pelaku Pengerukan : 2 Orang
3. Warga Masyarakat : 2 Orang

VI. Dusun Banjar Negeri

1. Tokoh Adat : 1 Orang
2. Tokoh Agama : 1 Orang
3. Pelaku Pengerukan : 1 Orang
4. Warga Masyarakat : 2 Orang

---

Total = 16 Orang

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 89.



## 6. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:<sup>27</sup>.

- a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Karna kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi Data adalah penyusunan ulang secara teratur, berurutan, logis, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
- c. Tabulasi, adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode katagori jawaban kemudian dimasukkan dalam tabel.

## 7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode Diskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian tersebut. Data mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, vidio, dokumen pribadi dan resmi.<sup>28</sup> Analisis kualitatif ini

---

<sup>27</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*.....,h. 182-184.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 7.

dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat di tarik kesimpulan yang jelas.

Analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintauan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis data digunakan kerangka berpikir secara deduktif.<sup>29</sup>

Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus dari suatu hal atas kasus.

penulis maksud di sini yaitu penulis menggambarkan Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Ilegal

---

<sup>29</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 32

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh siyasah berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara bahasa pengertian fiqh siyasah adalah “paham yang mendalam”. Iman al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya. Kata “*faqaha*” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).<sup>30</sup>

Menurut istilah fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara’* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara’* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>31</sup>

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 3.

siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>32</sup>

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>33</sup>

Ibn Al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn' Aqil menyatakan siyasah juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Dan siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara'*.<sup>34</sup>

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis siyasah, yaitu siyasah dzalimah yang diharamkan *syara'* dan siyasah adilah yang menegakkan kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan tercapainya tujuan syariat. *Syara'* berkewajiban untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 26.

<sup>34</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1993), h. 25.

merujuk pada siyasah adilah dan mejadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Ruang Lingkup fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karna hanya bersifat teknis.<sup>37</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah*

---

<sup>35</sup>Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama". *Jurnal Al Adalah*, Vol . X. 3 Januari 2012, h. 270.

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*....., h. 4.

<sup>37</sup>*Ibid*, h.14.



*'idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan) *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abl al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>38</sup>

Berdasarkan dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>39</sup>

- a) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b) *Siyasah Tasyri'yyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g) *Siyasah Tanfizidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 15.

Berkenaan dengan pola antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:<sup>40</sup>

- a) *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antar negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b) *Fiqh Siyasah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c) *Fiqh Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahtan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah, dengan metode-metodenya.

Metode fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *uff*, *adab*, *mashlahah mursalah* dan *istishhab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan *ijtihad* untuk mengantisipasi setiap

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi, yang mereka hadapi, dan tidak bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>41</sup>

*Siyasah dusturiyyah* adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara yang antara lain, membahas bentuk pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. *Siyasah qadha'iyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintah oleh lembaga eksekutif. Sedangkan *Siyasah kharijiyyah* membahas tata hubungan Internasional atau politik negeri.<sup>42</sup> fiqh siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima

---

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*..., h. 17.

<sup>42</sup>*Ibid.*

Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.<sup>43</sup> Dalam Al-Qur'an dasar hukum fiqh siyasah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## 2) Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar) Hadist pada mulanya berarti cara atau

<sup>43</sup>Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana 2006),h. 334.

jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh. Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya.

Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda *“sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka.”* Beliau ditanya, *“wahai rasullah, tidakkah kita memerangi mereka?”* maka beliau bersabda, *“tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan pada mereka.”* (HR. Muslim no. 1855).

Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Fungsi Hadist adalah.<sup>44</sup>

- a. Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut *ta'kid* dan *takrir*.
- b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar,

---

<sup>44</sup> M.M Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h.13-14.



membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur'an.

- c. Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam Al-Hadist merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

### 3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Pulungan mengemukakan prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur'an. Prinsip tersebut adalah prinsip kedudukan manusia di atas bumi sebagai Khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan, dan persaudaraan, persamaan, hubungan antara negara bertetangga, saling menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme. Dari pendapat-pendapat di atas, bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### a. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai Khalifah yang memakmurkan bumi, karena manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

---

<sup>45</sup>Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam....*, h 237-240..

b. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Allah memerintah agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya, dalam Islam amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Prinsip Penegak Keadilan.

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *al-adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn/ al-mizan*, *al-qisth*, dan *as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan.

d. Prinsip Musyawarah.

Musyawarah mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan urusan untuk beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat dibawah kewajiban shalat.

e. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi perintah Allah dan Rasul-nya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-nya. Itu sebabnya Allah merangkai kata "*athi'u*" hanya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak kepada pemimpin (*ulil al-amr*)

f. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat

yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman.

g. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.

h. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*.

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

i. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik Dalam Pengisian Jabatan Pemerintah.

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang

akan diangkat. Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

j. Prinsip Penegakan HAM.

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM tidak hanya terhadap orang islam saja melainkan terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama, dalam Al-Quran juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.

#### 4. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. *Fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Fiqh siyasah dusturiyyah*



mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.<sup>46</sup>

Menurut Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah bagian dari fiqh siyasah masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pada bagian berikut, masing-masing masalah ini akan dibahas secara perinci.<sup>47</sup>

#### a. Konsitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah “sesorang yang memiliki otoriter, baik dalam politik maupun agama.”<sup>48</sup>

Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis

---

<sup>46</sup>H.a. Djazuli, *Impelementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*....,h. 47.

<sup>47</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*....,h. 177.

<sup>48</sup>*Ibid.*

(konsitusi) kata *dustur* juga diserap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya undang-undang dasar suatu negara.<sup>49</sup>

b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*) dalam kontek ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>50</sup>

Di samping harus merujuk kepada *nashsh*, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, agar hasil

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 178.

<sup>50</sup>*Ibid*, h.187.

peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>51</sup>

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup siyasah *tasyri'iyah syar'iyah* (siyasah penetapan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat), *siyasah idariyah syar'iyah* (siyasah administrasi yang sesuai dengan syariat), dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* (siyasah pelaksanaan syariat).<sup>52</sup>

## B. Tanah

### 1. Pengertian Tanah

Kata *soil* (tanah) berasal dari bahasa Perancis kuno yang merupakan turunan dari bahasa latin *solum*, yang berarti lantai atau dasar. Pada umumnya, tanah berarti bagian permukaan terpisah dari bumi dan bulan sebagaimana dibedakan dari batuan padat. Manusia pertama di bumi tentu sudah menyadari bahwa tanah merupakan landasan yang mendukung kegiatan dan tempat tinggal mereka.<sup>53</sup>

Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Tanah dapat dimiliki siapa saja, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau aset perusahaan bahkan menjadi benda keramat. Jelas

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h.189.

<sup>52</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 40.

<sup>53</sup>Hendry D.Foth, Soenarto Adisoemarto, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, Edisi Keenam, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 1-2.

tanah mempunyai nilai ekonomis; semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah, juga tidak dapat terhindar, yang berakibatkan pada semakin tinggi konflik tanah.<sup>54</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian ini diatur dalam pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>55</sup>

Ahli berpendapat bahwa tanah sebagai material agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, tanah juga berpartikel padat disertai dengan zat cair gas yang mengisi ruang kosong diantara partikel padat tersebut. Tanah berguna sebagai pendukung pondasi bangunan dan bahan bangunanya itu sendiri, seperti batu, paving blok, tanah dapat diklasifikasikan secara luas menjadi tanah organik dan tanah anorganik, tanah organik adalah campuran yang mengandung bagian-bagian yang cukup berarti berasal dari lapukan dari sisa tanaman dan kadang dari kumpulan kulit kerang

---

<sup>54</sup>Rosnidar Sembiring, *HukumPertanahan Adat*, Cetakan Ke-1, (Depok:Grafindo Persada, 2017), h. 3.

<sup>55</sup>Supriardi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

dan kerangka organisme kecil lainnya, tanah anorganik berasal dari pelapukan batuan secara kimia ataupun pisik.

Pada umumnya klasifikasi tanah dilakukan terhadap besar butirannya, berikut pembagian tanah berdasarkan besar butirannya.<sup>56</sup>

1. Tanah berbutir kasar (pasir, krikil, tanah liat)
2. Tanah berbutir halus (lempung, lanau)
3. Tanah campuran

## **2. Hak-hak atas tanah**

### **a. Hak Milik**

Merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.<sup>57</sup>

### **b. Hak guna usaha**

Merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi guna usaha tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian bahwa hak guna usaha ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Lusmeilia Afriani, *Kuat Geser Tanah*, (Yogyakarta:Graha ilmu, 2014), h. 2.

<sup>57</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media,2005), h. 30.

<sup>58</sup>Supriadi, *Hukum Agraria....*, h. 110.

c. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan dan keadaan bangunan- bangunannya, jangka waktu tersebut dapat di perpanjang waktu paling lama 20 tahun.<sup>59</sup>

d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemerriannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.<sup>60</sup>

e. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.111.

<sup>60</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 41 ayat (1).

<sup>61</sup>Arba, *Hukum Agraria Indonesia....*, h. 123.



Di Indonesia, individualisme hak atas tanah terus berproses secara evolusi. Terjadi individualisme hak atas tanah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perkembangan penduduk yang terus meningkat, sehingga semakin menambah proses percepatan perpindahan penggunaan tanah mengakibatkan mulai terasa kekurangan tanah yang tidak seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk dan sulit mendapatkan tanah pengganti. Kedua, kemajuan ekonomi berupa hasil-hasil produksi pertanian, peternakan, membawa akibat bidang-bidang tanah tertentu mempunyai nilai lebih. Ketiga, menurunnya pengaruh dan kekuasaan hak persekutuan hukum yang jatuh ketangan para raja atau kaum penjajah (ketika itu). Keempat, peralihan pengaruh dan kekuasaani dari penguasa tradisional (adat) ketangan raja atau penjajah. Kelima, pengaruh yang datang dari luar.<sup>62</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya di bagi menjadi 2 yaitu:<sup>63</sup>

#### 1. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya

<sup>62</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat....*, h. 5-6.

<sup>63</sup>Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.49.

sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

## 2. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya seperti wewenang pada tanah hak milik, wewenang pada tanah hak guna bangunan, wewenang pada tanah hak guna usaha. Subjek hak atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah, adalah:<sup>64</sup>

### 1. Perseorangan

- a. Perseorangan atau sekelompok orang secara bersama-sama warga negara Indonesia.
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

### 2. Badan Hukum

- a. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, misalnya Departemen, Pemerintah daerah, perseroan terbatas, yayasan.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 59.

- b. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, misalnya bank asing yang membuka kantor perwakilan di Indonesia.
- c. Badan hukum privat, misalnya perseroan terbatas, yayasan.
- d. Badan hukum publik, misalnya departemen, pemerintah daerah.

### 3. Pengerukan

Pengerukan berasal dari kata dasar keruk (*dredge*), menurut kamus berarti proses, cara, perbuatan mengeruk. Sedangkan definisi pengerukan menurut Internasional perusahaan pengerukan adalah mengambil tanah atau materi dari lokasi di dasar air, biasanya perairan dangkal seperti danau, sungai, muara ataupun laut dangkal dan memindahkan atau membuangnya ke lokasi lain.<sup>65</sup>

Pengerukan adalah pekerjaan mengubah dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Menurut Andriawati, pengerukan adalah pekerjaan perbaikan daerah perairan terutama dalam masalah penggalian sedimen di bawah permukaan air dan dapat dilaksanakan baik dengan tenaga manusia maupun dengan alat berat, tujuan pekerjaan pengerukan adalah berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu memperdalam dasar

---

<sup>65</sup> “Pengerukan” (on-line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengerukan> (5 oktober 2020).

sungai/laut, memperbesar penambang sungai, mengambil material pasir laut untuk keperluan urugan / fill untuk keperluan penambangan; keperluan navigasi, pengendalian banjir / pengambilan material di muara sungai (delta), rekayasa konstruksi dan reklamasi, pemeliharaan pesisir / pantai; instalasi dan perawatan pipa bawah laut (*pipeline*).

Sedangkan menurut pekerjaan pengerukan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu pengerukan awal (*capital dredging*) yang dilakukan pada tanah yang telah lama mengendap. Pengerukan jenis ini biasanya digunakan dalam pengerukan dalam pelabuhan, alur pelayaran, waduk, atau area yang akan digunakan sebagai industri; pengerukan perawatan (*maintenance dredging*) yang dilakukan pada tipe tanah yang belum lama mengendap. Pengerukan ini dilakukan untuk membersihkan *siltation* yang terjadi secara alami. Pengerukan ulang (*remedial dredging*) yang dilakukan pada wilayah yang telah dikeruk namun mengalami kesalahan, biasanya berupa kesalahan kedalaman.<sup>66</sup>

Berdasarkan undang-undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang dimaksud dengan pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dihendaki atau mengambil material dasar perairan yang digunakan untuk keperluan tertentu<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Alland Andrian Josep, “Analisi Manfaat Dalam Proyek Pengerukan Studi Kasus: Alur Pelayaran Surabaya Timur”. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, Vol.0 no. 21 (Juni 2019), h.37-38.

<sup>67</sup>Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab 1 Pasal 1

#### 4. Kerusakan Lingkungan

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung/tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, Eksploitasi sumberdaya alam tanpa dibarengi dengan pelestarian akan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar.<sup>68</sup>

##### a) Terjadinya Erosi

Erosi pada dasarnya adalah proses perataan kulit bumi, karena pada proses erosi terdapat proses pengikisan pada bagian atas dan di sisi lain terdapat proses penimbunan pada bagian bawah. Namun demikian, karena dalam proses perataan kulit bumi ini banyak menimbulkan masalah baik pada sisi *on site* maupun pada sisi *off site*, maka erosi yang berlebihan perlu dicegah.<sup>69</sup>

Pada dasarnya erosi dipengaruhi oleh tiga faktor utama. (1) Energi hujan, air limpasan, angin, kemiringan, dan panjang lereng, (2) Ketahanan: erodibilitas tanah (ditentukan oleh sifat fisik dan kimia tanah) dan (3) Proteksi: penutupan tanah baik oleh vegetasi atau lainnya serta ada atau tidaknya tindakan konservasi.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Yudhistira, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambang Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9 (2). (February 2011)

<sup>69</sup> Irwan Sukri Banuwa, *Erosi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 28.

<sup>70</sup> Supli effendi rahim, *pengendalian erosi tanah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 30.

Erosi yang terjadi dapat dibedakan berdasarkan produk akhir yang dihasilkan. Erosi juga dapat dibedakan karena kenampakan lahan akibat erosi itu sendiri. Atas itu erosi dibedakan, (1) erosi percikan (*splash erosion*), (2) erosi lembar (*sheet erosion*), (3) erosi alur (*rill erosion*), (4) erosi selokan (*gully erosion*), (5) erosi tanah longsor (*land-slide*), (6) erosi pinggir sungai (*stream bank erosion*). Berdasarkan dengan proses erosi di mana pengangkutan tanah terjadi secara beransur-ansur, erosi tanah longsor ditandai dengan Bergeraknya sejumlah masa tanah secara bersama-sama. Hal ini disebabkan karena kekuatan geser tanah sudah tidak mampu untuk menahan beban massa tanah jenuh air di atasnya. Erosi tanah longsor banyak terjadi di seputar lereng yang terjal di seluruh Indonesia. Adapun erosi pinggir sungai yang mirip erosi tanah longsor mengikis pinggir-pinggir sungai yang karena sesuatu hal mengalami longsor terutama bila pinggir sungai itu vegetasi alaminya dan digantikan dengan tanaman baru.<sup>71</sup>

Erosi terjadi melalui proses penghancuran dan pengangkutan partikel-partikel dan/atau masa tanah oleh hujan, air limpasan, dan/atau angin, maka strategi untuk mencegah dan penanggulangan erosi pada tingkat mikro haruslah berdasarkan pada hal-hal berikut.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.*,h. 36-37.

<sup>72</sup>*Ibid.*,h. 81-82.



1. Menutup tanah untuk melindunginya dari penghancuran dari butir-butir hujan.
2. Meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah untuk mengurangi air limpasan.
3. Memperbaiki atau meningkatkan stabilitas agregat tanah.
4. Meningkatkan kekasaran permukaan untuk mengurangi kecepatan air limpasan dan angin.

b) Kerusakan Sungai

Kerusakaan daerah aliran sungai (DAS) disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari tekanan jumlah penduduk dan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan daerah aliran sungai yang dilakukan melalui pengaturan siklus hidrologi. Dengan mengupayakan peningkatan infiltrasi air hujan, cadangan air tanah, pencegahan erosi dan sedimentasi serta penanggulangan pencemaran air. Upaya tersebut akan dapat meningkatkan daya dukung sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penduduk. Dan dapat mengurangi terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Ikwanuddin Mawardi, "Kerusakan Daerah Aliran Sungai Dan Penurunan Daya Dukung Sumberdaya Air Di Pulau Jawa Serta Upaya Penanganannya". *Jurnal Hidrosfir Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2010), h.2.

Banyak faktor menjadi penyebab terjadinya banjir diantaranya sebagai berikut.<sup>74</sup>

### 1. Curah Hujan

Indonesia mempunyai iklim tropis hingga sepanjang tahun mempunyai musim yaitu musim hujan umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret, dan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan September. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir disungai dan bilamana melebihi tebing sungai akan timbul banjir atau genangan.

### 2. Pengaruh Fisiografi

Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi, dan keadaan daerah pengaliran sungai (DPS), kemiringan sungai, geometrik sungai (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang dari dasar sungai), lokasi sungai dll. Merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir.

### 3. Erosi dan Sedimentasi

Erosi di daerah pengaliran sungai berpengaruh pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia besar sedimen akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul genangan dan banjir disungai.

---

<sup>74</sup> Robert J. Kodoatie. Sugiyanto, *Banjir Beberapa Penyebab Dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 78.

#### 4. Kapasitas Sungai

Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi daerah pengaliran sungai dan erosi tanggul sungai yang berlebihan. Cara penanganan pengendapan banjir dilakukan secara teknis maupun non teknis, dibagian hilir maupun bagian hulu. Namun yang menjadi pertimbangan adalah sesuai dengan kondisi fisik daerah yang ditangani. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas di sebabkan oleh tangan manusia yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum 30: 41)

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa semua kerusakan yang dilakukan manusia, maka manusia itu sendiri yang akan merasakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, karena sesungguhnya tugas manusia di bumi ini yaitu menjaga bumi dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya.

## **C. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017**

### **Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

#### **1. Penjelasan umum**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 136 menyatakan, (1) Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. (2) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelesaian otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantu. (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. (4) Peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (5) Peraturan daerah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembar daerah.<sup>75</sup>

Sebagaiman diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Lampiran Huruf E Nomor 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan

---

<sup>75</sup>Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.220.

urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang “cekatan” (cerdas, kreatif, aman, taqwa dan andalan) dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Pesisir Barat “terwujudnya masyarakat Pesisir Barat yang madani, mandiri, dan sejahtera”. Dengan di terbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di laksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentaman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.<sup>76</sup>

Dalam peraturan Kabupaten Pesisir Barat nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada bagian keenam tertib lingkungan pasal 15 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengerukan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokasi penggalian dan/atau pengerukan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, h.19.

<sup>77</sup>*Ibid*, h.10

Kebijakan diartikan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberi hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sarana atau suatu maksud tertentu. Hal ini menyangkut dimensi yang sangat luas.<sup>78</sup>

Dalam mewujudkan peraturan daerah diperlukan faktor-faktor pendukung agar kaidah-kaidah hukum dapat berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:<sup>79</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta rasayang didasarkan pada kasta manusia didalam pergaulan hidup.

## **2. Pengertian perizinan**

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

---

<sup>78</sup>A. Syamsul Alam, Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Kajian Implementasi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.3, Juni 2012.

<sup>79</sup>Soerjono Soekarto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 70.



menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>80</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa. Pertama, izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum, dapat dipahami kegiatan-kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa izin dari pemerintahan yang berwenang, kedua. Dalam izin pada umumnya dimuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, dalam izin ditentukan siapa yang di berikan hak untuk melakukan kegiatan yang identitasnya sering kali telah tercantum dengan jelas, pihak yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan disebutkan apa saja yang diizinkan, pada batasnya, baik mengenai waktu, lokasi, volume, maupun hal-hal deskriptif lainnya yang menyangkut sesuatu yang bersifat objektif, ketiga. Izin sebagai keputusan yang merupakan instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintahan,

---

<sup>80</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.168.

maupun kepentingan lainnya, untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan tertentu sering kali tidak lepas dari kewajiban pemenuhan syarat yang di dalamnya termasuk rangkaian pengujian.<sup>81</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Skripsi dengan judul Dampak Penambangan Pasir di Sungai LUK ULO Terhadap Lingkungan (Survei Di Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kabumen). Atas nama Farida Muniroh, tahun 2016. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Penambangan pasir sedot terhadap kerusakan lingkungan di sungai LUK ULO Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kabumen terhadap lingkungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak penambang pasir di Sungai LUK ULO terhadap lingkungan berupa kerusakan lahan pertanian seperti penurunan luas lahan, longsor dan tanah menjadi tandus yang disebabkan oleh penambang pasir menggunakan mesin sedot pasir. Persamaan dengan penelitian ini ialah, objek penelitian yang sama-sama tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang, dan juga merusak lingkungan di sekitar sungai. Perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan metode cara mengambil pasir menggunakan alat modern seperti mesin sedot sedangkan metode pengambilan pasir yang diteliti oleh peneliti adalah metode tradisional menggunakan alat sederhana seperti sekop dan lain-lain. Skripsi ini lebih menyeluruh sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada Analisis Fiqh Siyasah.

---

<sup>81</sup>Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),h.85-86

Skripsi dengan judul Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Permukiman di Desa Ujung Baji Kecamatan Sandrobone Kabupaten Takalar. Atas nama Dhiaurrahma, tahun 2018. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Membahas tentang Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Permukiman di Desa Ujung Baji. Desa Ujung Baji terletak di Kecamatan Sanrobone, di Desa ini terdapat tambang pasir yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat terutama bagi yang bermukim di sekitar tambang pasir. Tambang yang ada di Desa Ujung Baji tidak memiliki izin berdasarkan undang-undang No 1 tahun 2014 (tentang perubahan atas UU No27/2007) tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) maka izin lokasi untuk penambang pasir laut ini belum ada izinnnya. Persamaan dari skripsi ini ialah objek penelitian sama-sama tidak memiliki izin dari pemerintah. Perbedaannya adalah lokasi penelitian berlokasi di Desa Ujung Baji Kecamatan Sandrobone Kabupaten Takalar sedangkan tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

Skripsi dengan judul Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambang Pasir di Tinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur). Atas nama Sri Widiyani, tahun 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Membahas tentang Analisi Dampak Lingkungan Akibat Penambang Pasir Dari Perspektif Etika Bisni Islam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang terjadi pada

kegiatan penambangan pasir di Desa Rejo Mulyo memiliki dampak positif yakni membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dampak negatifnya meningkatnya polusi udara, kebisingan dan jalan raya rusak namun dampak yang di peroleh lebih banyak negatifnya. Persamaannya dengan sekripsi ini ialah perusakan lingkungan terhadap lingkungan di sekitar tempat penambang. Perbedaannya adalah dari sifat penelitian yang digunakan, pada skripsi ini menggunakan metode ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan metode hukum Islam, serta objek penelitian ini memiliki izin dari pemerintah setempat sedangkan objek penelitian yang peneliti teliti tidak mempunyai izin atau *ilegal*.

Meskipun beberapa tinjauan pustaka di atas ada beberapa kemiripan tetapi penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Fokus yang diangkat dari penelitian ini pada **Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Ilegal (Studi di Sungai Way Pedada di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)**”



## DAPSTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 15

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Pasal 41 ayat (1)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Bab 1, Pasal 1

### Buku-buku

Afriani, Lusmeilia, *Kuat Geser Tanah*, Yogyakarta:Graha ilmu, 2014.

Al-Maududi, Abu A'la, Sistem Pokitik Islam, Judul Asli "*The Islamic Law And Constitution*", Penerjemah Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011.

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka cipta, Cetakan kedua, 1993

Azimi, M.M, *Hadist Narbawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

Banuwa, Irwan Sukri, *Erosi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi



- Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, H.A. *fiqh siyasah impelementasi kemaslahatan umat dan rambu-rambu syariah*, Jakarta: prenada media group, 2003.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Foth, Hendry D, dan. Soenarto Adisoemarto, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Huijbes, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Khairudin Tahmid, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Aneka Printing Metro, 2004.
- Kodoatie, Robert J., dan Sugiyanto, *Banjir Beberapa Penyebab Dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke3, 1997.
- Rahim, Supli effendi, *Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Santoso, Urip, *pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, Jakarta: prenadamedia group, 2010.
- Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukuim Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, Cetakan Ke-1, Depok: Grafindo Persada, 2017. Supriardi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Singarimbun, Masrid, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995.
- Soekarto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* , Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010.
- Sungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2015.

Syarif, Mujaribnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

### **Jurnal**

Alam, A. Syamsul, Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Kajian Implementasi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.3, Juni 2012.

Irwantoni, “Peran Siyasah Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama”. *Jurnal Al Adalah*, Vol . X. 3 Januari 2012.

Josep, Alland Andrian, “Analisi Manfaat Dalam Proyek Pengerukan Studi Kasus: Alur Pelayaran Surabaya Timur”. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, Vol.0 no. 21, Juni 2019.

Mawardi, Ikwanuddin, “Kerusakan Daerah Aliran Sungai Dan Penurunan Daya Dukung Sumberdaya Air Di Pulau Jawa Serta Upaya Penanganannya”. *Jurnal Hidrosfir Indonesia*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2010.

### **Wawancara**

Afrizal, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 03 september 2020

Darmawan, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 15 september 2020

Dwi Rafai, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 05 september 2020

Eksir Abadi, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 06 september 2020  
Erfendi, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 10 september 2020  
H. Marbawi, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 11 september 2020  
Jalal Efendi, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 07 september 2020  
Lazwardi, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 12 september 2020  
M. Tho'at Pratama, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 10 september  
2020

Mansyur Sah, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 06 september 2020  
Meliana, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 05, september 2020  
Rahman Payadi, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 05 september 2020  
Rikal Son, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 09 september 2020  
Rikardo, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 4 september 2020  
Rizal, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 16 september 2020  
Taufik Ali, wawancara dengan penulis, penggawa v ilir, 08 september 2020

### **Sumber *on-line***

Wikipedia. "Pengerukan" (on-line), tersedia di:

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengerukan> (5 oktober 2020).

Wikipedia. "Illegal" (On-Line), Tersedia di:

<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Enti/Illegal>, (27 Desember 2020).